

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN BUM DESA

Sugeng Budiharsono

KONSEPSI PEMBERDAYAAN

- Hulme dan Turner (1990) menyatakan pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional.
- Pemberdayaan sifatnya individual, kolektif organisasional dan sekaligus sistemik. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial.
- Paul (1987) bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN

(lanjutan)

- Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:
 - *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
 - *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
 - *Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN

(lanjutan)

- Secara konseptual pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
- Keberhasilan proses pemberdayaan tergantung pada dua hal: (1) kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (2) Kekuasaan dapat diperluas.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN

(lanjutan)

- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.
- Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
- Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

INDIKATOR PEMBERDAYAAN

- keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis.
- Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).
- Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

TUJUAN PROSES PEMBERDAYAAN

- Meningkatkan kegiatan produksi dan pendapatan masyarakat dengan tidak akan merubah status quo,
- Memampukan masyarakat yang bergelut dengan kebutuhan dasar dan selama ini tidak terwakili dalam struktur perwakilan,
- Memampukan masyarakat yang tidak percaya diri di dalam menghadapi kelompok yang berkuasa ataupun usaha besar
- Meningkatkan pendidikan dan kemampuan teknologi bagi masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas, dan
- Memberikan akses informasi yang relevan pada masyarakat

BUM Desa dan BUMDes

PERMENDESA NO 4 TAHUN 2015

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, **adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa** melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- meningkatkan perekonomian Desa;
- mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- membuka lapangan kerja;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

PERMENDAGRI NO 39 TAHUN 2010

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, **adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.**

BENTUK ORGANISASI BUM DESA

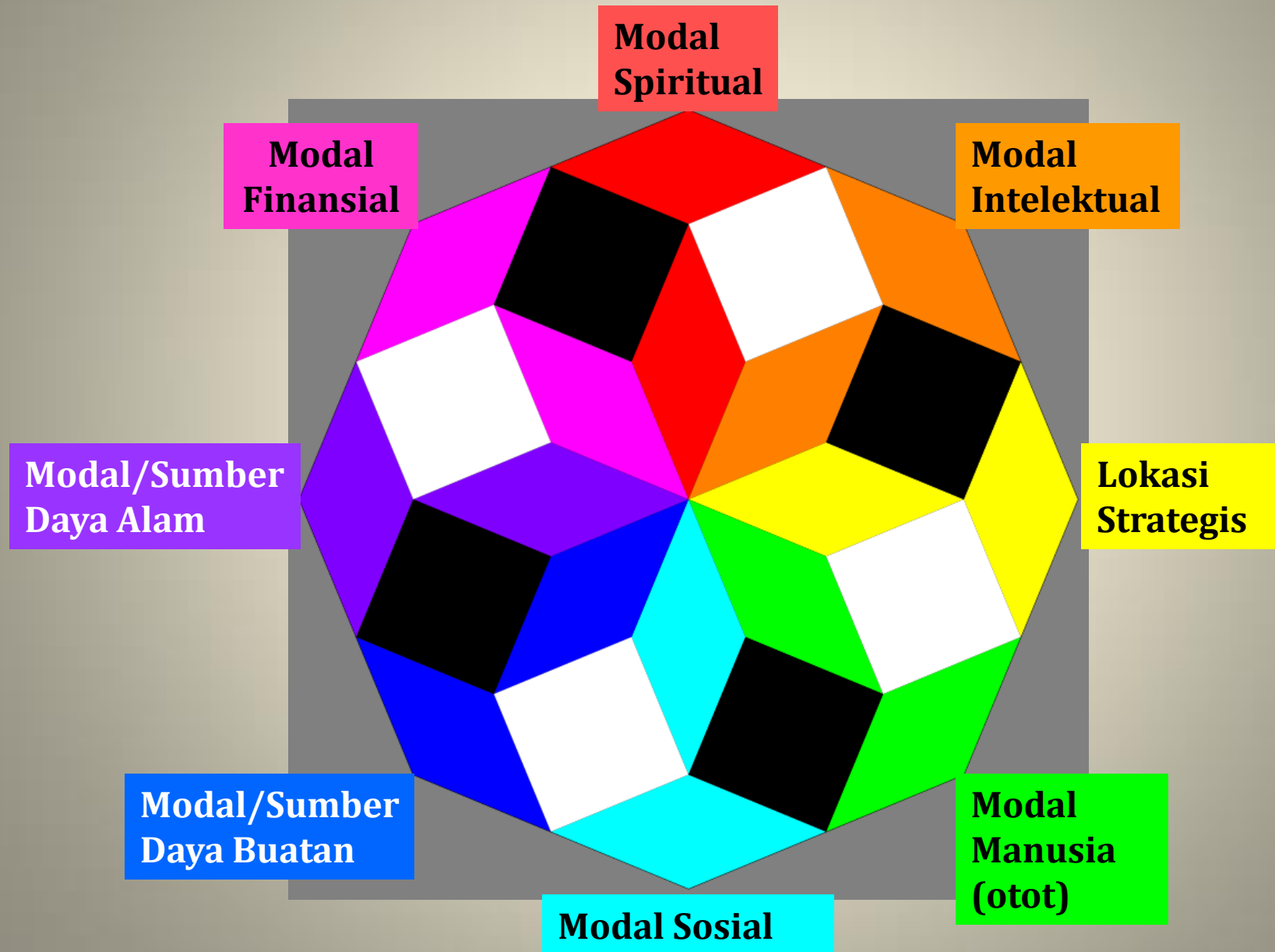
Permendes No 4/2015 Pasal 7

- 1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- 3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

PERLUNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA

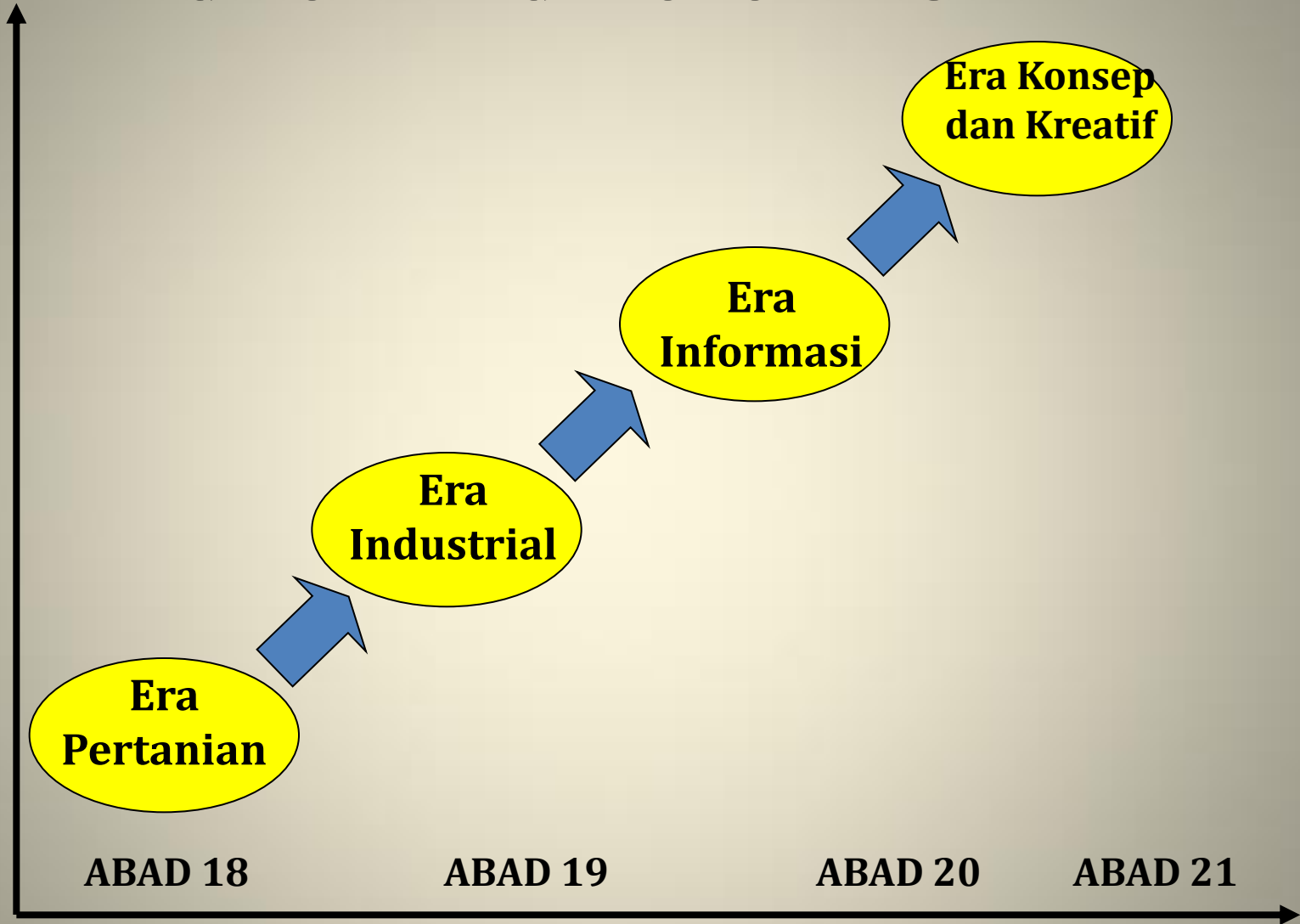
- Kondisi masyarakat desa saat ini masih kurang melek bisnis, sehingga masyarakat agar tidak terus menerus menjadi *stakeholder* tetapi diharapkan menjadi *shareholder* pada BUM Desa, maka perlu diberdayakan (dari *Stakeholder* menjadi *Shareholder*).
- Pemberdayaan dalam ini ditekankan atau diarahkan kepada *Community Economic Development*.
- Pemberdayaan terutama dikaitkan dengan *business literacy*, *financial literacy* dan *banking literacy*.

OKTAGONAL SUMBER DAYA MASYARAKAT DAN DESA YANG PERLU DIBERDAYAKAN



PEMBERDAYAAN MENGIKUTI GELOMBANG EKONOMI DUNIA

Kesejahteraan, Teknologi dan Globalisasi



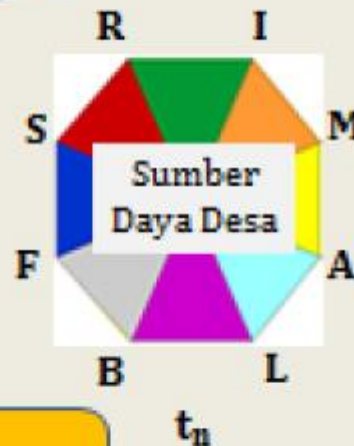
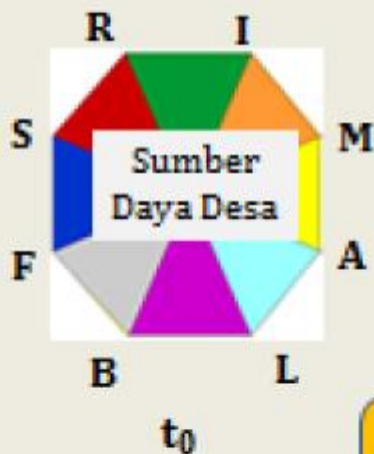
PEMBANGUNAN DESA

Prinsip/Azas Pembangunan Desa

- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan berpusat kepada manusia
- Penghidupan berkelanjutan
- Tangguh terhadap Bencana

Tujuan Pembangunan Desa

- meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- Meningkatkan kualitas hidup manusia
- Penanggulangan kemiskinan



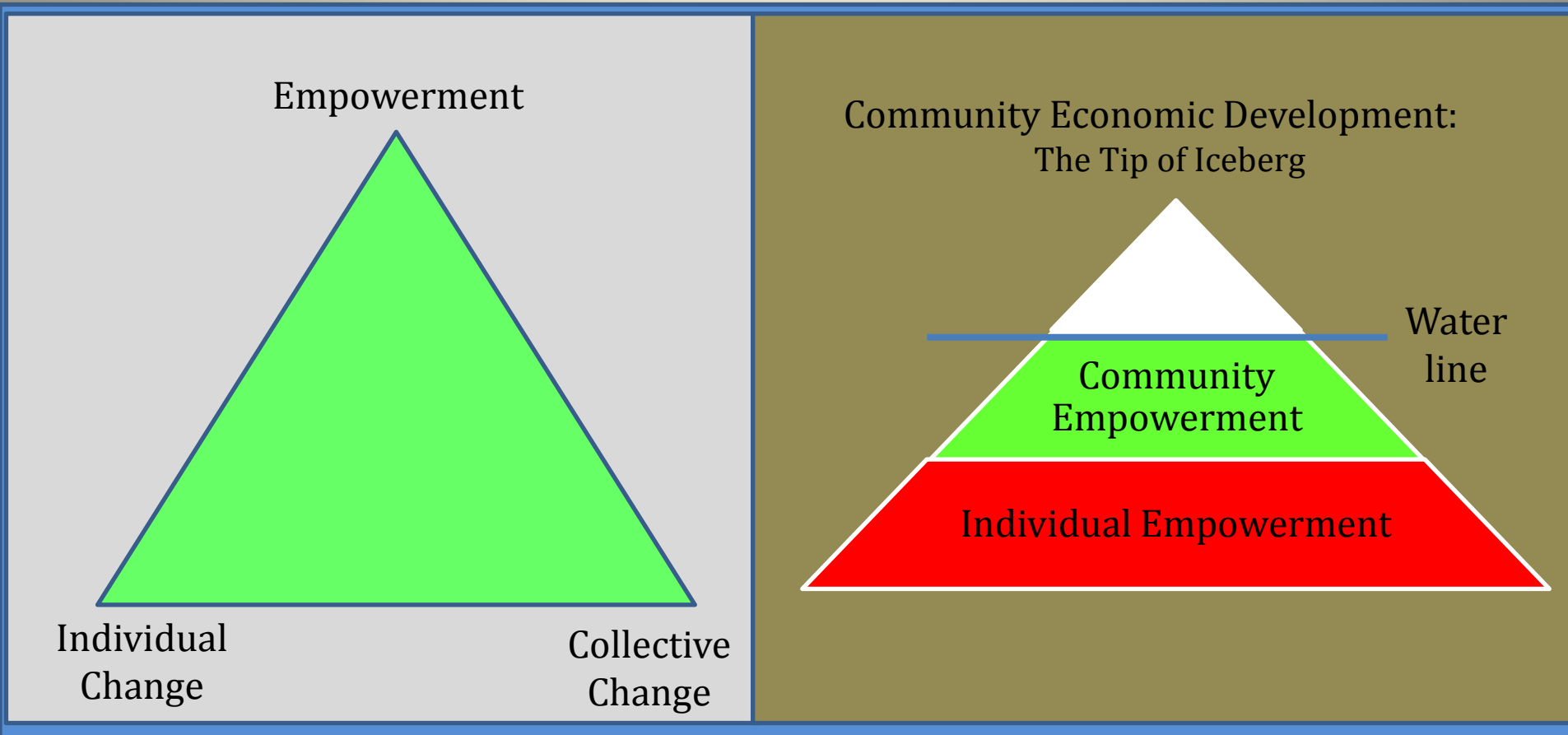
Pembangunan Desa

Pendekatan
Desa Membangun
dan
Membangun Desa

Keterangan:

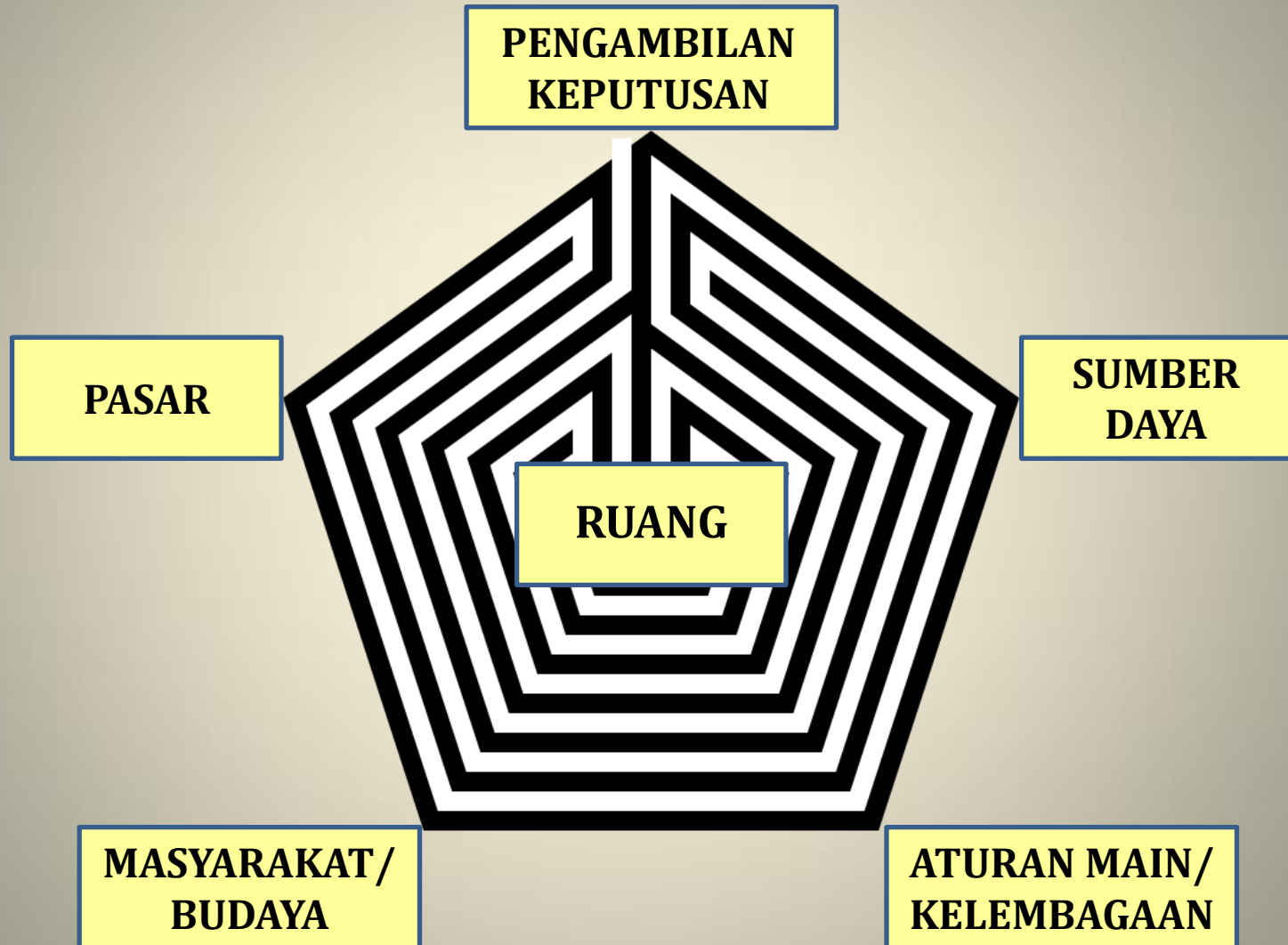
R	Modal Spiritual	L	Lokasi Strategis
I	Modal Intelektual	B	Sumber Daya Buatan
M	Modal Manusia	F	Modal Finansial
A	Sumber Daya Alam	S	Modal Sosial

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT



Sumber: Wilson, P. A., 1996

PENTAGONAL PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

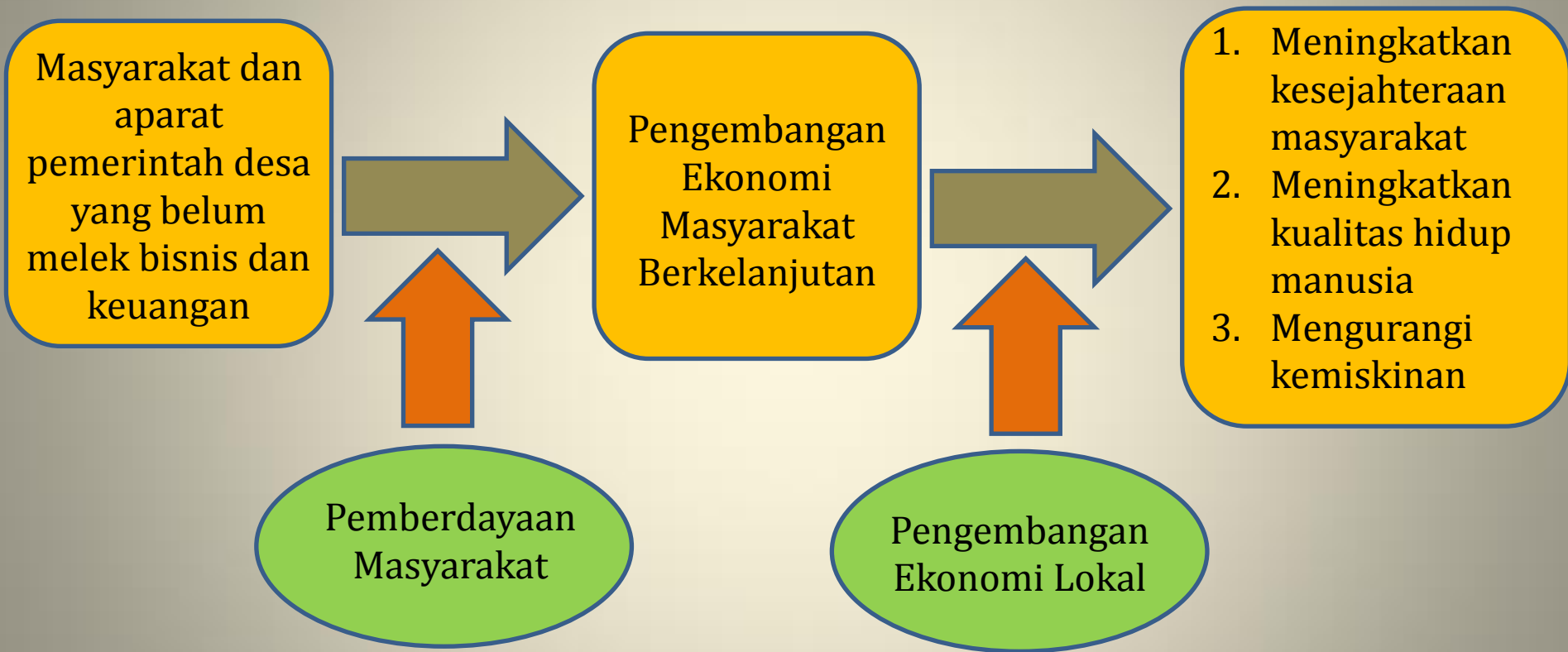


PERBEDAAN ANTARA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

No	PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)	PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT (PEM)
1.	Fokus utama pada pengembangan ekonomi dan kerja yang layak	Fokus kepada isu sosial seperti kemiskinan, eksklusi sosial, dan <i>business illiteracy</i> , dan <i>financial and banking system illiteracy</i> .
2.	Digagas oleh berbagai kalangan luas (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, dan donor	Digagas oleh beragam aktor, seperti LSM atau organisasi internasional
3.	Mencakup berbagai pendekatan, melibatkan pelaku usaha lokal,	Berusaha melibatkan kelompok termarginalkan dan masyarakat miskin

Saran: Pengembangan BUM Desa sebaiknya menggunakan pendekatan PEL pada saat masyarakat sudah meleak bisnis

DARI PEM KE PEL



DEFINISI DAN PRASYARAT PEL

- Definisi PEL adalah usaha mengoptimalkan SUMBER DAYA LOKAL yang melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MASYARAKAT LOKAL dan ORGANISASI MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan (Panduan Pengembangan Ekonomi Lokal, Bappenas)
- Prasyarat PEL
 - PEL adalah proses multistakeholder, sehingga merupakan proses yang melibatkan stakeholder kunci, terutama dunia usaha, masyarakat dan pemerintah, dalam seluruh tahapan PEL.
 - Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Desa dalam PEL, yang diimplementasikan terutama dengan adanya program/kegiatan serta anggarannya setiap tahunnya dalam rentang waktu yang lama.
 - *Strong leadership* (khususnya dari Kepala Desa amat diperlukan dalam membangun komitmen. Aplikasinya adalah tersediannya anggaran untuk PEL dari Pemerintah Desa yang terlibat sampai waktu tertentu.
 - Membangun komitmen antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan organisasi masyarakat madani yang kuat.
 - Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa PEL bukan “proyek” dari pemerintah namun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi saja.
 - Perubahan *mindset* terutama dalam hal: kedisiplinan, kebersihan, moral yang baik (tidak korupsi), keamanan, kesopansantunan, keramahan, dan mengubah *mindset* stakeholder desa bahwa PEL merupakan milik dan kebutuhan bagi desa.

TERIMA KASIH

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono
2. Tempat/tgl lahir : Cirebon, 13 Juli 1960
3. Pendidikan/ *short courses* : Sarjana Pertanian, IPB, 1983
Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB, 1995
Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin, Italia, 2009
Short course on Local Governance and Rural Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2010
Short course on Market Access for Sustainable Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2013
4. Pengalaman Pekerjaan : Gerson Lehrman Group Council Member
Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2006 – sekarang dan Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang
Chief Technical Advisor for Local Economic Development, BAPPENAS, 2006-2014
Pengajar pada *International short course on Local Economic Development*, Wageningen University and Research CDI The Netherlands, di Johannesburg, South Africa.